

Pola Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi

(Wawancara dengan Prof. Dr. Conny M. Semiawan)

Solicha

Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Edukasi

Globalisasi menghadirkan beragam pilihan dan peluang, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu civitas akademika harus mampu menjawab tantangan globalisasi dengan menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu memilih tanpa kehilangan identitas dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Conny M. Semiawan memberikan satu pola strategi pengembangan perguruan tinggi yang dikupas dalam wawancara berikut. Wawancara dilakukan oleh Solicha, Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Edukasi.

Bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi dewasa ini?

Secara umum perguruan tinggi terdiri dari perguruan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang jumlahnya sekitar 80. Ada juga perguruan yang dikelola oleh departemen-departemen lain dan yayasan-yayasan yang disebut dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berjumlah kurang lebih 2000. Dan ini sering menjadi persoalan yang cukup rumit dalam menentukan standar yang bersifat nasional. Standar tersebut terkait dengan kompetensi tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga dengan sistem penyelenggaraan itu sendiri. Persyaratan atau standar tersebut sering disebut dengan istilah :

R-A-I-S-E ++ (plus plus); R: Relevancy, A: Academic Atmosphere (Iklim Akademik), I: Institutional, S: Sustainability (kesinambungan) dan E: Efficiency. + leadership (kepemimpinan) dan + Governance (tata among/ organisasi).

Setiap perguruan tinggi harus memenuhi syarat tersebut. Tetapi sekarang, ada paradigma baru bahwa perguruan tinggi harus memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi, yaitu dengan adanya *equality, equity* dan *eficiency*, persamaan dan keadilan yang berarti akses untuk memasuki perguruan tinggi harus diperluas. Konsekuensi dari kebijakan ini ialah bahwa yang masuk ke perguruan tinggi akan sangat beragam (heterogen sekali). Untuk itulah mengapa meskipun Menteri Pendidikan Nasional tidak mengha-

ruskan PT untuk menyelenggarakan SPMB, tetapi rektorat masih menyelenggarakan SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru). Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan standar kualifikasi bagi mereka yang akan memasuki perguruan tinggi. Jadi meskipun sangat heterogen baik etnis, agama maupun budayanya, tetapi kemampuan umum atau inteligensi tidak sia-sia untuk memasuki PT. Dan pihak perguruan tinggi pun tidak kerepotan dalam praktek selanjutnya.

Kebijakan lain adalah berkaitan dengan makin banyaknya pemberian otonomi kepada kampus. Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dan rektor punya kewenangan yang lebih luas. Tetapi konsekuensinya apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Perguruan Tinggi bisa terselenggara dengan modus dan cara yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga pada akhirnya melahirkan apa yang dikenal dengan perguruan tinggi yang sangat maju dan ada yang berorientasi pada bisnis semata tetapi ada juga yang berorientasi pada pengembangan ilmu dan pencarian kebenaran ilmu. Jadi heterogenitas bukan hanya di populasi saja tetapi juga dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai uji coba, ada 4 perguruan tinggi yaitu ITB, UI, UGM dan IPB yang diberikan kewenangan untuk mencari dana sendiri dan mengolah sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Selain itu juga perguruan tinggi harus melakukan evaluasi diri untuk mengejawantahkan kekuatan dan kelemahannya yang bermuara pada *quality improvement*. Sehingga *quality insurance* suatu perguruan

tinggi tetap terjaga. Dalam hal ini peran dari *stakeholders* sangat besar, karena tanpa *input* dari mereka, kemungkinan penyelenggara pendidikan akan cenderung pasif.

Globalisasi selain menghadirkan peluang positif juga negatif. Banyak pilihan yang ditawarkan. Bagaimana civitas akademika mampu menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu memilih tanpa kehilangan jati dirinya?

Globalisasi sangat terkait dengan dua hal yaitu: *pertama*, banjir informasi karena peningkatan IPTEK mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga negara berkembang seringkali bukan hanya kurang dapat mencerna tapi juga kurang memahami karena begitu cepat perubahannya. *Kedua*, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang sudah bisa mengejar dan mampu menginkorporasikan apa yang menjadi kemajuan IPTEK tersebut dalam keseluruhan hidupnya, sehingga mau dikombinasikan dengan berbagai kejadian di dalam dirinya sendiri. Tanpa mempertimbangkan orang atau kelompok masyarakat lain. Kalau nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan kecenderungan globalisasi tidak berjalan harmonis, terjadilah *corrlate* yang berakibat negatif. Untuk itu setiap perguruan tinggi dipersyaratkan untuk mempunyai visi tertentu yaitu apa yang mau dicapai, kemampuan apa yang menjadi *output* dari penyelenggaraan perguruan tinggi itu. Bagaimana mencapai apa yang disyaratkan dalam visi tersebut disebut dengan misi. Dari sini kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan-tujuan.

Jati diri terkait dengan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Artinya sekarang jika posisi kita berada di titik awal (*Point of Departure*) dan ingin mencapai visi tertentu (*Point of Arrival*), maka perjalanan inilah yang akan kita tempuh agar tidak terjadi *cor slate* dengan apa yang terjadi dalam lingkungan internal. Jadi globalisasi itu termasuk salah satu kecenderungan dari lingkungan eksternal yang terdiri atas IPTEK dan sosial budaya, *stakeholders* (staf akademik, mahasiswa, pemerintah/yayasan dan industri) serta pasar kerja, pasar informasi, pasar jasa dan pengabdian yang diserap hasilnya). Lingkungan internal yang sudah dijabarkan di atas terkait dengan kultur organisasi (cara berpikir, konteks/struktur organisasi, struktur sosial, suasana akademis, dan keterhubungan/proses), SDM/aktivitasnya (staf akademis, mahasiswa, SDM lain, dana, aset fisik, informasi dan 'lingkage') serta dari kepemimpinannya (pola dan gaya kepemimpinan, keterbukaan, pola pengambilan keputusan dan metode). Kesemuanya harus diidentifikasi dan dianalisa untuk dapat mengetahui masalah kritis. Hal ini yang disebut dengan evaluasi diri agar tidak terjadi *cor slate*.

Agar pengaruh globalisasi dapat dimanfaatkan maka kita harus mempunyai alternatif penyelesaian dalam rangka peningkatan kinerja program studi atau lembaga tertentu. Hal ini yang disebut dengan *Renewal Processing Sintesa* yaitu proses yang kita perbaharui dalam setiap kali kita melangkah kepada suatu tujuan tertentu. Ini yang disebut dengan SWOT Analysis. Dan meru-

pakan pola strategi pengembangan Perguruan Tinggi dalam menjaga *quality insurance*.

Kalau kita ingin agar lulusan kita tidak terpelanting dalam menghadapi arus globalisasi tetapi tidak kehilangan jati dirinya maka seluruh civitas akademika harus ikut bukan hanya membantu dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal, tetapi juga dengan mengisi tuntutan lingkungan internal dalam perguruan tinggi itu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap program studi mempunyai apa yang disebut dengan kurikulum yang memiliki kompetensi dasar dan kompetensi pendukung, juga kompetensi lain sebagai tambahan yang dianggap perlu untuk mewujudkan kompetensi dasar. Dan yang paling penting kompetensi dasar harus sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini pimpinan dituntut untuk dapat mengomunikasikan dengan jelas, sehingga tidak terlalu sulit dalam mewujudkan visi/misi tersebut. Tetapi kalau hal ini tidak ada, atau ada tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik pada *grass root level* (anak buah maupun mahasiswa), untuk membuka pintu, mendengarkan ide, memberikan umpan balik dan sebagainya sehingga menjadi universal maka akan sia-sia.

Salah satu komponen yang turut berperan dalam menjaga quality insurance adalah kurikulum. Bagaimana rancangan kurikulum yang merefleksikan kesinambungan antara content, context dan target group?

Untuk mengembangkan kurikulum ada tiga analisa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah

siapa populasi mana yang kita hadapi (*target group analysis*). Kedua, populasi target tersebut hendak diapakan dan dibawa ke mana. Ini terkait dengan visi PT. Inilah yang disebut dengan *context*. Maksudnya kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki apabila dia lulus dari perguruan tinggi, yang disebut dengan kinerja-kinerja yang dipersyaratkan untuk dapat disebut sebagai lulusan perguruan tinggi. Dari sini akan dapat gambaran bahwa kompetensi-kompetensi tertentu harus kita seleksi dan kita letakkan pada mata kuliah tertentu. Ini berkaitan dengan analisa ketiga yaitu *content analysis*. Ketiga analisa tersebut dikenal dengan nama *Front-end Analysis*. *Front* itu konten apa yang harus menjadi zona/area kurikulum itu. Konteksnya adalah *end*. Artinya para lulusan PT itu harus dibekali dengan apa. Selain itu ada juga yang disebut dengan banjir informasi

yang menyebabkan kurikulum itu harus dikaji. Sebab perubahan kurikulum terkait dengan perubahan dalam temuan IPTEK. Memang ada yang disebut *basic skill* atau ketrampilan dasar yang relatif tetap sifatnya, tetapi ada juga ketrampilan yang spesifik yang harus selalu diperbaharui karena terkait dengan perkembangan IPTEK.

Ada yang mengatakan bahwa kebijakan perubahan pendidikan di tanah air kita senantiasa gagal menjawab problema masyarakat?

Pernyataan tersebut belum pernah terbukti. Artinya sampai saat ini belum ada penelitian empirisnya, yang membuktikan gagal atau berhasilnya suatu kebijakan. Pernyataan gagal itu hanya pendapat kelompok tertentu saja. Tidak ada indikator yang jelas untuk membuktikan pernyataan tersebut.